

## DAFTAR BACAAN

### A. Literatur

- Aditama, Tjandra Yoga, **Manajemen Administrasi Rumah Sakit**, UI-Press, Jakarta, 2002.
- AzwarAzrul, **Pengantar Administrasi Kesehatan**, Bina Rupa Aksara, Jakarta, 2010.
- Djaali, dkk. **Hak Asasi Manusia (Suatu Tinjauan Teoritis dan Aplikasi)**, Restu Agung, Bandung, 2003.
- Kurniati, Anna dan Ferry Efendi, **Kajian SDM Kesehatan**, Salemba Medika, Jakarta, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Notoatmodjo, Soekidjo, **Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni(cetakan 1)**, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Praptianingsih, Sri, **Kedudukan Hukum Perawat Dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Prinst, Darwan, **Sosialisasi & Diseminasi Pengeakan Hak Asasi Manusia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Putri, Asih Eka, **Seri Buku Saku-2: Paham BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan)**, Friedrich-Ebert-Stifung, Jakarta, 2014.
- Supari, Siti Fadiliah, dkk, **Sistem Kesehatan Nasional**, Departemen Kesehatan, Jakarta, 2009.
- Syamsuni, **Farmasetika Dasar dan Hitungan Farmasi**, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2005.

### B. Peraturan Perundang-undangan

- UUD 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran serta Kode Etik Kedokteran.
- Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 374/MENKES/SK/III/2007.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 99a./MENKES/SK/1982.
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.
- Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan No.2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan dan Pembayaran Denda Akibat Keterlambatan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan.
- Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nomor 2 Tahun 2016 tentang Unit Pengendali Mutu Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat.
- Peraturan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Jaminan Kesehatan.

### **C. Koran**

Jawa Pos (30 Juli 2016), **Pasien BPJS Terkapar Lambat Ditangani.**

**D. Website**

<http://www.depkes.go.id>

<http://pppl.depkes.go.id>

<http://www.jpnn.com>

<http://koran-sindo.com>

<http://m.beritajatim.com>